

Judul : Jangan hanya KUR, industri film butuh pendanaan alternatif
Tanggal : Sabtu, 20 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Jangan Hanya KUR Industri Film Butuh Pendanaan Alternatif

FOTO TEDY RMI



Novita Hardini

ANGGOTA Komisi VII DPR Novita Hardini meminta pemerintah lebih serius memberikan insentif bagi pelaku industri kreatif, khususnya sektor film, dan karya-karya yang mendukung nilai edukasi dan pesan positif bagi masyarakat.

Menurut Novita, kehadiran negara dalam mendukung industri film nasional masih belum optimal. Pemerintah dinilai belum membangun ekosistem yang adil dan berkelanjutan, padahal industri film membutuhkan skema pendanaan jangka panjang yang dikelola secara profesional dan transparan.

"Dukungan negara tidak cukup hanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Industri ini membutuhkan ekosistem pendanaan berkelanjutan yang dikelola secara profesional dan transparan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Politikus PDI Perjuangan itu menyinggung keberhasilan film dokumenter bertema lingkungan Ra Ritek yang meraih Piala Citra pada Festival Film Indonesia (FFI) 2025. Film yang diproduksi Wahyu Adhi Nugroho dan disutradarai Alvina N.A tersebut dinilainya mencatat sejarah baru sekaligus menandai meningkatnya minat publik terhadap film yang mengangkat isu lingkungan.

"Kemenangan Ra Ritek menunjukkan bahwa film kini menjadi medium aspirasi publik. Penghargaan ini bukan sekadar capaian artistik, melainkan bukti bahwa pesan moral dalam film semakin mendapat tempat di masyarakat," kata Novita.

Dengan berkembangnya karya-karya kreatif yang kuat secara pesan dan kualitas, ia menilai dukungan pemerintah semestinya diperkuat, bukan sekadar menjadi penonton atas geliat industri film nasional.

Novita juga menegaskan bahwa industri kreatif memiliki hak yang sama untuk mengakses pendanaan ventura sebagaimana sektor industri lainnya. Ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara seperti Korea Selatan, India, China, dan Thailand yang sukses mengeksport film secara masif berkat skema pendanaan khusus di sektor perfilman.

"Negara-negara tersebut lebih dulu menyadari besarnya potensi ekonomi industri film," tegas legislator dari Dapil Jawa Timur VII itu.

Dorongan serupa sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim. Ia menyebut banyak negara berhasil mengembangkan industri film melalui kebijakan potongan pajak dan skema tax rebate yang mampu menekan biaya produksi sekaligus menarik investor. "Di negara lain, biaya teknis memang lebih tinggi, tetapi insentif pajak membuat daya saing industrinya meningkat," ujarnya.

Chusnunia menilai, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dari sisi biaya produksi yang relatif lebih murah. Namun, keunggulan tersebut belum ditopang kebijakan fiskal yang memadai sehingga film nasional masih sulit bersaing tanpa adanya keringanan pajak. ■ PYB